

EDISI : Kamis, 07 Februari 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media: *BALI EXPRESS*

Kategori: *KERELAWANAN*

Pemkab Buleleng Siap Rekrut PPPK, Eks K-II Berpeluang

SINGARAJA-Kabar gembira bagi tenaga honorer (TH) Eks K-II di Pemkab Buleleng. Angin segar itu datang dari Kementerian Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI, soal Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I tahun 2019. Dalam waktu dekat, rekrutmen PPPK ini pun siap diselenggarakan di Kabupaten Buleleng.

Perekrutan itu sesuai dengan ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018, tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PP ini sebagai amanat dari Undang-Undang Nomo 5 Tahun 2013, tentang Aparatur Sipil Negara ASN. Atas rencana tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng, I Gede Wisnawa, pun mengklaim sudah siap menggelar

rekrutmen. Wisnawa menjelaskan rekrutmen tahap I PPPK ini hanya diperuntukkan bagi tenaga honorer (TH) Eks K-II yang tercatat di database pemerintah pusat.

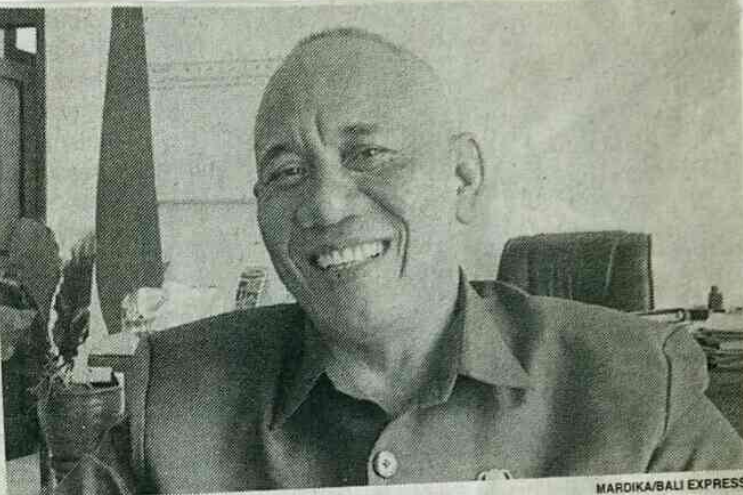
Data dari BKPSDM menyebutkan Kabupaten Buleleng dijatah oleh KemenPAN-RB sebanyak 157 orang. Dengan rincian, tenaga guru sebanyak 115 orang, tenaga kesehatan 3 orang dan penyuluh pertanian berdasarkan SK Menteri Pertanian atau berdasarkan nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan pemerintah daerah sebanyak 39 orang.

"Nanti yang berhak mendaftar adalah mereka para Tenaga Honorer Eks K-II yang sudah terdaftar di pusat. Datanya sudah ada di pusat. Jadi mereka tinggal mendaftar dan wajib mengikuti tes CAT," ujar Wisnawa.

Terkait urusan penggajian, rencananya akan dibebankan

bersama Bagian Keuangan berencana akan berkordinasi ke pusat besok (hari ini, Red)," imbuhnya.

Lalu berapa estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menggaji PPPK? Dari hasil perhitungan kasar dengan Bagian Keuangan, maka dibutuhkan anggaran



I Gede Wisnawa

di masing-masing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) daerah. Namun, sambung Wisnawa yang menjadi persoalan adalah APBD 2019 sudah diketok palu.

"Apakah nanti diperbolehkan (menggunakan APBD TA 2019, Red)? Karena kan APBD 2019 sudah ketok palu? Mungkin saja dibayarkan di Anggaran Perubahan. Agar jelas, kami

sebesar Rp. 2,2 milyar jika para PPPK ini Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pada April 2019 mendatang. Terlebih ratusan tenaga honor tersebut sebelumnya sudah digaji di masing-masing SKPD. Jadi tinggal menambahkan, berapa gaji pokoknya.

"Karena Tenaga Honor Eks

K-II statusnya sampai saat ini masih terikat kontrak dan masih aktif di setiap SKPD. Tinggal ditambah saja gaji pokoknya, makanya dapat angka kasar Rp 2,2 miliar. Kalau dari nol hasil hitung-hitungannya ya sebesar Rp. 5 Milyar," pungkasnya. **(dik/ima)**

Nama Media: *BUM EXPRESS*

Kategori: *PERDAGANGAN*

Diberikan Sosialisasi, Pedagang Sampaikan Unek-Unek

Pemerintah Segera Akan Merelokasi Pedagang Banyuasri ke Pasar Darurat

SINGARAJA-Ratusan pedagang Pasar Banyuasri dikumpulkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dagprin) Kabupaten Buleleng di Gedung Sasana Budaya, Rabu (6/2) siang kemarin. Mereka diberikan sosialisasi terkait rencana relokasi ke pasar darurat seiring program revitalisasi Pasar Banyuasri, Singaraja. Sejumlah pedagang pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan unek-unek terkait rencana relokasi yang diluncurkan pada April mendatang.

Seperti yang disampaikan Ratmi Dwi Ika, pemilik usaha Maruti Gym yang beroperasi di areal Pasar Banyuasri. Ia mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah yang melakukan revitalisasi pasar agar menjadi lebih baik.

Namun di sisi lain, selama revitalisasi dilakukan, Ratmi khawatir usahanya tak bisa



DIALOG: Pedagang di Pasar Banyuasri saat berkordinasi dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Buleleng Ketut Suparto di Gedung Sasana Budaya, Rabu (6/2) siang kemarin.

berjalan. Meskipun Dagprin menyiapkan pasar darurat. Pasalnya pasar darurat yang disediakan tidak cukup menampung banyaknya peralatan fitness lantaran keterbatasan ukuran.

"Secara pribadi saya mendukung. Tapi saya masih gelisah. Utamanya soal penempatan alat-alat fitness sementara pembangunan pasar dilakukan. Padahal saya sudah cari keliling untuk menyewa tempat agar bisa beroperasi. Justru pemilik lahan tidak mau menyewakan,

karena mereka khawatir lantainya rusak," keluhnya.

Tak cukup disana. Ratmi juga khawatir dengan nasib karyawannya jika Gymnya tak beroperasi selama dua tahun. "Trus bagaimana karyawan saya, apalagi dua tahun tidak beroperasi. Bisa dibayangkan saya makan apa? karena hasilnya dari sana," imbuh pensiunan guru SMAN 1 Singaraja ini.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan

dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, Ketut Suparto mengatakan pihaknya tak mampu mengakomodir seluruh kepentingan pribadi dari para pedagang. Hanya saja, dalam relokasi ke pasar darurat, pihaknya menjamin seluruh pedagang berhak mendapatkan fasilitas berupa los, ruko maupun kios di Pasar Banyuasri.

"Relokasi para pedagang kami sudah siapkan lokasi, yaitu di terminal Banyuasri dan Jalan Samudera. Untuk pedagang los jumlahnya 552, kami siapkan 572 buah, ruko jumlahnya 92 buah, dan untuk pemilik kios yang terdaftar ada sebanyak 56 orang, kami siapkan juga sejumlah 56 buah," paparnya.

Suparto menambahkan, anggaran yang digunakan untuk membangun pasar darurat ini mencapai Rp. 1,4 milyar. Saat ini, pihaknya telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan segera diserahkan ke Bagian Layanan Pengadaan (BLP) untuk diproses tendernya.

"Sesuai petunjuk Bupati, BLP diminta memprioritaskan proses tendernya. Apabila proses tender dapat dilaksanakan bulan Februari, maka akhir Februari sudah ditetapkan

pemenang (tendernya). Dengan pengerjaan 1,5 bulan yang dimulai awal Maret, maka paling lambat akhir bulan April sudah dilaksanakan relokasi," ungkap Suparto.

Disinggung terkait fasilitas tambahan di pasar darurat, Suparto menyebut seluruh kios, ruko dan los sudah pasti diberikan fasilitas listrik. Sedangkan untuk air bersih, hanya akan dibangun titik secara umum saja. Mengingat pasar darurat ini sifatnya hanya sementara.

"Kalau persoalan listrik sudah pasti aman. Kami sudah siapkan di setiap los dan kios. Sedangkan untuk urusan air bersih, kami memang tidak siapkan per kios. Nanti disiapkan air secara umum, paling beberapa titik saja. Karena pasar darurat kan sifatnya sementara, tidak mungkin kami bangun titik air secara permanen," pungkasnya.

Seperti dikehendaki, Pemkab Buleleng berencana membangun revitalisasi Pasar Banyuasri sebagai pasar semi modern terbesar di Buleleng. Revitalisasi ini diprediksi akan menghabiskan anggaran sebesar 180 miliar lebih, dengan sistem penganggaran multyyears. (dik/ima)

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media:

BSALI GAMBER

Kategori:

PEDAGANG KIOS

Sewa Kios Dinaikkan, Pedagang Pasar Sudaji Meradang

Besaran Sewa Rp 1,5 Juta Hingga Rp 3 Juta Setahun

SINGARAJA - Belasan pedagang di Pasar tradisional, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng meradang Rabu (6/2) siang. Mereka memprotes keputusan sepihak Bumdes Sudaji atas kenaikan tarif sewa kios yang dinilai pedagang terlalu mahal. Dengan besaran sewa Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta pertahun.

Seperti diungkapkan perwakilan pedagang, Luh Budiarti, 56. Ia mengaku sangat terkejut ketika menerima surat pemberitahuan kenaikan tarif sewa kios yang dikirim seorang pegawai unit Pasar Desa Sudaji. Dalam surat yang diterimanya itu menyebutkan, bagi pedagang yang memanfaatkan kios di dalam pasar dikenakan sewa tanah dan lapak desa adat pakraman Rp 3 juta per tahun.

Sedangkan untuk pedagang daging Rp 1,5 juta per tahun ditambah dengan biaya retribusi Rp 2000 per hari. Rencananya, keputusan itu berlaku mulai Kamis mendatang. Keputusan itu telah ditandatangani Putu Hartawan selaku Direktur Bumdes Sudaji, Gede Suardana Kepala Unit Pasar Desa Sudaji, I Komang Sudiarta selaku Perbekel Desa Sudaji, serta I Nyoman Sunuada selaku Kelian Desa Pakraman Sudaji.

"Sebagai pedagang kami sangat keberatan. Apalagi tidak pernah diundang oleh aparat desa untuk berdiskusi soal kenaikan tarif sewa ini. Tadi lagi jualan, tiba-tiba menerima

surat pemberitahuan kenaikan tarif sewa itu. Tiba-tiba tarifnya naik," sesal Budiarti, warga Banjar Kaje Kangin, Desa Sudaji.

Wanita yang berjualan daging babi dan ayam di pasar Desa Sudaji sejak 12 tahun itupun sempat membandingkan retribusi sebelumnya. Selama itu, dirinya hanya cukup membayar uang retribusi Rp 3000 per harinya, atau sekitar Rp 1 juta ribu per tahunnya, ditambah dengan biaya listrik Rp 10 ribu per bulan.

Atas naiknya tarif sewa kios ini, Budiarti pun merasa sangat keberatan. Selain mahal, lokasi tempat ia bedagang juga terbilang sempit yakni hanya 1.5 meter.

"Tempat sudah sempit, masak naik lagi. Tidak sesuai lah. Sedangkan saya setiap hari tidak menentu dapat untung berapa. Kalau dagingnya habis, dapat Rp 60 ribu. Kalau dagingnya masih, ya rugi, kalau bisa diturunkan lah, jadi Rp 500 ribu setahun," harapnya.

Sementara itu Perbekel Desa Sudaji, I Nyoman I Komang Sudiarta dikonfirmasi melalui saluran telepon pun enggan berkomentar banyak. "Ya kenaikan tarif ini memang sesuai dengan peruman dan atas sepengetahuan saya. Namun biar lebih pasti telepon Jero Bendesanya nggih," singkatnya.

Sementara I Nyoman Sunuada selaku Kelian Desa Pakraman Sudaji saat dikonfirmasi juga irit bicara, dengan alasan sibuk. Ia malah meminta agar koran ini menghubungi Ketua Bumdesnya Putu Hartawan, dengan alasan sedang sibuk. "Tiang agak sibuk, Coba Ketua Bumdesnya telepon nggih," kilahnya, (dik/ima)